BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama pada perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.PRG mengabulkan gugatan cerai penggugat yang beragama Kristen terhadap Tergugat yang beragama Islam, bahwa 1) mengabulkan permohonan talak satu *ba'in shughrā* ; dan 2) menetapkan bahwa anak hasil perkawinan yang lahir pada 28 Februari 2014 tetap diasuh oleh penggugat sampai berusia 7 tahun. Putusan ini juga menjadi panduan praktik prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak bagi Hakim dalam menilai kasus yang serupa yang muncul dimasa mendatang. Walaupun penggugat telah beralih agama dari Islam ke Kristen anak yang belum *mumayyiz* secara hukum lebih baik diasuh oleh ibunya selama tidak ada bukti yang menunjukkan potensi dampak negatif terhadap keyakinan atau perkembangan anak. Putusan ini merupakan contoh konkret dari penerapan Hukum Islam dalam masyarakat yang beragam, sekaligus menunjukkan keberanian dalam memilih pendekatan yang mendukung perlindungan anak.
2. Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.PRG merupakan putusan yang valid baik secara formil dan materiil. Secara formil karena proses penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Secara materiil penjatuhan talak satu *ba'in shughrā* telah sesuai dengan pasal 116 huruf f dan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Putusan talak satu *ba'in shughrā* ini sesuai dengan fiqh mengingat talak yang diberikan

merupakan talak satu *ba'in shughrā* dalam konteks *khulu'* atas permintaan pihak istri. Selanjutnya mengenai penetapan hak asuh anak kepada ibu yang non-muslim, hal tersebut telah sesuai menurut Hukum Islam dengan berdasarkan pada prinsip maslahat dan kaidah *Maqāsid Al-Khassah*, *Maqāsid Asy Syarī'ah* dan *Al-Masyaqqatu tajlibut taysīr*. Meskipun dalam pandangan fiqh klasik mayoritas ulama tidak membenarkan *Ḥaḍānah* oleh orang tua non-muslim terhadap anak muslim, namun dalam kasus ini hakim mempertimbangkan kebutuhan *Adh-Dharūriyāt* anak, dan tidak ditemukannya bahwa ibu akan mengubah akidah anak. Dari perspektif Hukum Positif putusan ini valid dan mengikuti pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

B. Saran

Ketentuan *Ḥaḍānah* oleh orang tua non muslim seharusnya dijelaskan lebih rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan supaya ketika ada permasalahan yang sama dimasa yang akan datang hakim dalam memutuskan perkara dapat menemukannya, karena dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan bagaimana jika seorang non-muslim mendapatkan hak asuh anak juga tidak dijelaskan hingga usia berapa non-muslim dapat mengasuh.